

“Thanks to the internet, government in the future will be more responsive, more efficient, and less bureaucratic.” (Margolis & Resnick)

2012

Nofia FITRI

IP:TCP [Indonesian Politics: Technology & Computer Project]

**Demokrasi, Kebebasan PERS
dan Teknologi Komputer**

DEDIKASI

Kekuatan 'ide' adalah 'power' untuk merubah bangsa sementara masa depannya berada dipundak generasi muda. Anak Muda terlahir dalam takdir mereka sebagai Kapal Perubahan yang dibekali ide-ide brilian untuk Merubah DUNIA. Tanpa adanya bimbingan dari generasi pendahulu, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa awak yang seharusnya mengarahkan mereka. Tanpa adanya dukungan dari segenap masyarakat, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa dermaga yang seharusnya menjadi labuhan mereka. Tanpa adanya pengaruh dari konstalasi sosial-politik di sekitar mereka, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa angin yang seharusnya menggerakkan mereka.

-Dari GENERASI MUDA untuk INDONESIA-

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas rahmat ALLAH SWT dan restu Sang Bunda, terima kasih penulis dihaturkan kepada:

Kang Onno W. Purbo inspirasiku, Uda Harry Sufehmi dan Abah Abimanyu K.

Kawan-kawan Hacker Muda yang aktif dalam berbagi ILMU di dunia maya: Devilzc0de Indonesia, X-code, Binus Hacker Team, Indonesian Hacker Team, Jasakom Perjuangan, Hacker-Newbie Community, Komunitas Hacker Indonesia, Rajakadal Forum & Blackhat Team, Bekasi Cyber Community, Sumatra Hacker/Aktivis-Security, Blackcode, Echo, dan semua Penggerak Komunitas Pencinta Teknologi Komputer Underground Indonesia.

Kawan-kawan Aktivis Gerakan Mahasiswa dan Organisatoris Muda, terkhusus rekan-rekan Pendiri dan Penerus Perjuangan Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Nasional (KSM UNAS) Jakarta.

Kawan-kawan Peneliti Muda Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) untuk Islam, Pluralisme dan Demokrasi Indonesia, beserta kang Yudi Latif PhD atas bimbingan dan rekomendasi studi untuk penulis.

Kawan-kawan Research/Teaching Assistants, para Instructors dan Pembimbing Master Thesis penulis di Department of International Relations, EMU/Turkey serta seluruh Mahasiswa penulis kelas 'Introduction to Global Politics' (Spring 2010).

Kawan-kawan diskusi via facebook dan Hacker Groups serta para Sahabat (Ocit, Sandra, Meta, Viska, Bang Reza, aak Fauzi (Cakill), om Anton (Mywisdom), om Ula (Petimati), om Taufan (Whitehat), om Wenkhairu, om xtronic, om Leo Retro, om Redbastard, om Utuh BHT, Uda Randy (Eidelweiss), Uda Richy (Aurel666), Uda Bayu (van Adam), mas Kurniawan 'X-code', dan adikku Sang MataHarry dunia maya (KeTEk aka b374k), dll) yang kerap memotivasi, memberi jalan terang dan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan penulis.

Terakhir dan terkhusus untuk Dedi Romeo 'My Programmer' yang dari Kesabaran serta Dukungannya memberi begitu banyak energi kepada Penulis (*when I look at you, you appear just like a dream to me*).

For those Hacktivists, Hackers, Exploiters, Security Pentesters, Programmers, Webdesigners, Carders, Crackers, Defacers, even every Lammer, and else, no matter who you are, thank you for contributed on the way of my Deep Thinking

Kata Pengantar

“Thanks to the internet, government in the future will be more responsive, more efficient, and less bureaucratic.” (Margolis & Resnick)

Reformasi 1998 menandakan satu babak baru, Indonesia yang bebas dari belenggu kekuasaan otoriter. Dimulai dari diamandemennya perundang-undangan sampai perubahan sistem politik, kebebasan pers, hingga perkembangan dunia cyber dan interaksinya dengan masyarakat luas.

Pengalaman Indonesia, secara jelas memperlihatkan bahwa internet dapat menjadi ‘a cyber civic space’ dimana masyarakat dapat saling berbaur tanpa intervensi negara. Selain itu internet juga dapat memberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan pemerinthan termasuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang memudahkan kerja-kerja manusia. Perwujudan inilah yang kemudian dikenal dengan konsep e-government.

E-government system dalam tatanan ideal dunia global berujung kepada suatu cita-cita open-society/masyarakat terbuka yang untuk mewujudkannya teknologi yang menjadi sarana itu sendiri harus lebih dahulu dibebaskan, disosialisasikan secara merata, dapat dijangkau dan dimanfaatkan semua kalangan, atau apa yang disebut dengan open technology.

Lalu yang menjadi pekerjaan rumah kemudian, dengan dimulainya e-government system, pemerintah pun harus mensinergiskannya dengan keamanan technology dari computer security demi menghadapi dinamisasi technology global yang terpolitisasi negara-negara besar.

Free e-Book ke-4 Bunga Mataharry, yang berupa kumpulan artikel ini mendeskripsikan isi kepala penulis analisi dan konsep terkait dunia politik dan teknologi hari ini, peran hacking komputer terhadap penegakan demokrasi dan perwujudan dunia masa depan yang menjadi cita-cita segenap warga dunia.

Bangsa INDONESIA sesungguhnya membutuhkan para AHLI untuk duduk pada posisi kepemimpinan demi satu Perubahan, Harapan ku, mereka terketuk hatinya untuk mengintervensi bangsa dengan ILMU dan KONTRIBUSI nya.

SELAMAT MEMBACA...

Salam Hangat, Nofia

Daftar Isi

Indonesian Politics: Technology & Computer Project [IP:TCP]

Demokrasi, Kebebasan PERS dan Teknologi Komputer

DEDIKASI

UCAPAN TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

A. FREEDOM OF PRESS & FREEDOM ON INTERNET

1. Revolusi Jurnalisme pasca Wikileaks
2. Refleksi Wikileaks: Hacktivism dan Partisipasi Politik Global
3. Dunia Setelah Wikileaks

B. DEMOKRASI & INTERNET INDONESIA

1. Finding Democracy (Part I): Dilemma Freedom & Authoritarian
2. Internet Indonesia dan Deliberative Democracy
3. Untuk Indonesia dari Generasi Teknologi

C. POLITIK & TEKNOLOGI KOMPUTER

1. From Hacker to Hacktivism
2. Cyberpolitics: Perang Dunia Maya dan Tantangan Dunia Masa Depan
3. Wawasan Cyber-Politics: Hacktivism, Cybercrime to Cyberwarfare
4. Indonesia E-Government: Teknologi untuk Demokrasi Bangsa

PENUTUP

TENTANG PENULIS

Revolusi Jurnalisme pasca Wikileaks

“You can change the world with the right words”

Pers Global dan Wikileaks

“Revolusi, Jurnalisme dan Investigasi” seperti menjadi kata-kata keramat di penghujung tahun lalu setelah mencuatnya kontroversi organisasi whistleblower wikileaks. Revolusi jurnalisme investigasi pada akhirnya terlempar sebagai sebuah ‘statement membakar’ tersebar luas di kalangan media dan publik dunia menjadi penutup catatan panjang kemandulan jurnalisme investigasi global.

Statement yang didorong oleh mencuatnya fenomena wikileaks, organisasi *whistleblower* berbasis di Swedia yang mempublikasikan ribuan dokumen-dokumen rahasia negara hasil bocorannya pun menarik perhatian para scholar dunia. Emilly Bell dari London School of Economic and Politics menyatakan *“the emerging of wikileaks case forces journalist and news organizations to demonstrate to what extent they are now part of an establishment in their duty to report.”* Dalam kata lain *“wikiLeaks exposes the degree to which normal journalism has lost its watchdog role.”*

Dalam kontroversinya wikileaks beroperasi memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, menjalin koneksi dengan ribuan pendukung dalam dunia maya, serta berkolaborasi secara ‘simbiosis mutualisme’ paling tidak dengan beberapa media berkelas internasional, The New York Time (AS), The Guardian (UK), Der Spiegel (Jerman), La Monde (Perancis) dan seperti yang baru-baru ini diberitakan dengan media Rusia...

Merefleksi wikileaks sesungguhnya bukan menempatkan posisi sebagai pendukung atau penghujat organisasi whistleblower tersebut, melainkan melihat tatanan baru dalam konstalasi global dimana masyarakat dunia kembali mempertanyakan kebebasan pers dan jurnalisme investigasi.

Revolusi Jurnalisme

“If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.” ~ George Washington

Peristiwa 9/11 bisa jadi satu instrumen penting dalam menganalisis kebebasan pers dalam tatanan global, dan tentu saja mempengaruhi konstalasi nasional. Meskipun demikian nafas kebebasan pers di tanah air tercatat sebagai hasil reformasi 1998 dengan menumbangkan

kekuasaan otoriter Orde Baru. Berbagai amandemen Undang-undang negara memunculkan ratusan media-media lokal dari cetak hingga elektronik bebas menyebarkan produk-produk jurnalistik mereka.

Revolusi jurnalisme dimulai dari menjamurnya sosok-sosok pemberani menantang arus global. Jurnalisme investigasi kembali bergairah ditandai dengan konsistennya media-media internasional dalam mempublikasikan fakta-fakta dibalik kerja pemerintah. Bahwa mereka yakin publik perlu informasi, menuntut keterbukaan dan media percaya prinsip kebebasan pers tidak dibatasi kekuasaan.

Berkaca dari Media Asing

*“The rise of Internet journalism has opened a new front in the battle to protect free speech.”
(New York Times, Editorial (US), February 21, 2008)*

Media-media pers asing seperti Der Spiegel misalnya, mendorong masyarakat untuk menarik suatu kesimpulan atau paling tidak merefleksikan suatu berita, tidak hanya sebatas memperoleh suatu informasi lalu ditelan bulat-bulat untuk kemudian menjadi sejarah masa lalu. Peran-peran ini lah yang harus dimulai media-media pers Indonesia dimana jurnalisnya memiliki kemampuan analisis masalah, sehingga informasi yang disajikan menjadi padat yang ketika publik membaca tidak sebatas ‘proses scanning.’

Kejadian yang direportasekan Media-media pers nasional jika disuguhkan dengan analisis dan sentuhan sejarah dapat memberikan nilai dan mutu suatu berita. Karenanya media-media nasional harus mulai memberdayakan jurnalis yang sekaligus ‘analisis’ untuk memproduksi berita-berita bermutu, yang selain bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang apa yang terjadi didunia hari ini, juga merefleksi masa lalu dan memprediksi masa depan.

Jurnalist dan ‘Conviction’ Merubah Dunia

“Karena kekuatan bahasa dapat merubah dunia, dan ketajaman pena mampu memberi bentuk baru tatanan dunia masa depan” (Nofia Fitri, Winter 2011, Turkey)

Tidak hanya sebatas terinspirasi John Pilger dan Naomi Klein, (tokoh Indonesia) menjadi jurnalis hari ini adalah suatu ‘langkah berani’ untuk mulai merubah dunia. Saya adalah seseorang yang percaya bahwa ada tiga profesi di dunia yang mampu memberikan bentuk baru pada wajah tatanan global: (1) artis; (2) hacker; dan (3) jurnalis.

Bagi jurnalis, media tidak sebatas 'alat' kendaraan profesi, melainkan ruang 'sensitif' dalam menyalurkan informasi, inspirasi serta keyakinan diri, sementara bagi media, jurnalis bukan sebatas 'alat' pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan, memberikan informasi kepada publik atau memperoleh profit, melainkan sebagai 'nyawa' dari keberlangsungan hidup tentang visi dan misi yang dijunjung suatu news media. Diantara keduanya terdapat harmoni dimana kerja-kerja mencerdaskan publik nantinya akan menghasilkan masyarakat haus informasi dan 'aware' terhadap fenomena disekitar mereka.

“Senjatakku tidak menembakan peluru ke targetnya, tidak juga mencecerkan darah ketika melukai targetnya. Aku tidak melakukan pengisian-ulang amunisi selama 'keyakinan' dan independensiku tak tergoyahkan. Aku adalah Jurnalis yang akan merubah dunia.”

Refleksi Wikileaks: Hacktivism dan Politik Global

Sang hacker-jurnalis Rick Cook dalam novel populer *Wizardry Compiled* mengungkapkan “*it is never the technical stuff that gets you in trouble. It is the personalities and the politics.*” Dari sepenggal kalimat tersebut dapat ditangkap sekilas ‘pesan’ terkait kontroversi wikileaks, organisasi whistleblower yang menghebohkan dunia setelah diterbitkannya ribuan kawat diplomasi AS serta kasus dugaan penyelewengan seksual Julian Assange sang pendiri situs pembocor dokumen rahasia-rahasia negara tersebut.

Bahwa fenomena wikileaks bukan semata aksi mengabaikan hukum dengan melegalkan aktivitas *hacking* komputer untuk membocorkan dokumen-dokumen rahasia negara yang mempublikasikannya dianggap tidak bertanggungjawab, melainkan lebih kepada persoalan ‘*convictions*’ tentang politik dunia hari ini serta wawasan dan pandangan dari para aktivis-aktivis cyber. Jauh sebelum para aktivis cyber melihat politik hari ini dimana pola-pola kepemimpinan otoritarian membatasi kebebasan individu, mengakarnya politik konspirasi, menghegemoninya kepentingan kapitalis serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh penguasa Jean-Jacques Rousseau sudah terlebih dahulu menegaskan “*politics is neither religion nor morality.*”

Electronic Civil Disobedience

Fenomena wikileaks dimana kemajuan teknologi melalui dunia cyber digunakan untuk tujuan-tujuan politik sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Tahun 1998 digegerkan dengan kasus ‘JE’ seorang hacker muda Inggris yang berhasil mengakses sekitar 300 website di dunia termasuk India's Bhabha Atomic Research Centre, dengan menyusupkan pesan anti-nuklir. Komunitas cyber pro-demokrasi yang menamakan dirinya *Hong Kong Blondes* menyusupkan pesan tentang HAM dan pengungkapan kasus Tiananmen melalui website pemerintah China sementara aksi cyber mendukung gerakan Zapatista dimotori oleh komunitas yang menamakan dirinya *the Electronic Disturbance Theater (EDT)* berawal di 1994 berujung dengan diaksesnya situs pribadi presiden Meksiko, selain menciptakan software *floodnet* untuk mengundang partisipasi massa.

Yang juga menarik misalnya *concern* komunitas hackers British *the Electrohippies* terhadap isu-isu globalisasi yang secara terang-terangan menolak *World Trade Organization (WTO)*, hingga pesan-pesan kolompok ‘*political crackers*’ *World's Fantabulous Defacers* dalam memperjuangkan Palestina dan Kasmir. Tak ketinggalan komunitas hackers Portugal *Urban KaOs* dalam hal pembelaan mereka atas kemerdekaan Timor-timur yang berhasil menyusupi website pemerintah Indonesia ditahun 1990-an. Kelompok-kelompok *hacktivist* tersebut dianggap terinspirasi kuat oleh eksistensi sebuah komunitas hackers berbasis di Texas *the Cult of the Died Cow (cDc)* pencipta *Goolag*, dan menjadi kelompok hackers pertama yang mempopori istilah *Electronic Civil Disobedience (ECD)*. Sementara itu

sebenarnya masih hangat ditelinga bagaimana komunitas pendukung wikileaks *Anonymous* melancarkan aksi pembalasan dendam (*payback*) terhadap VISA, Mastercard dan Paypal dengan dalih memperjuangkan 'kebebasan' dalam dunia cyber. Kasus-kasus hacking terbesar ini bagi sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pergerakan berarti 'revolusi teknologi' dalam hal kepedulian kaum cyber (hacker-aktivis) terhadap konstalasi politik global, karenanya semakin mempopulerkan istilah *hacktivism*.

Istilah *hacktivism* mungkin tidak terlalu akrab ditelinga masyarakat umum. Istilah ini mendefinisikan bagaimana kemampuan teknis-komputer digunakan untuk tujuan-tujuan politik, dan dapat digolongkan sebagai aksi pembangkangan civil menggunakan media teknologi atau *Electronic Civil Disobedience*. Melalui disertasi menarik doktoral ilmu politiknya di Harvard yang tak tanggung-tanggung di bimbing oleh Sidney Verba, Alexandra Samuel mengutip dari Denning (1999) yang mengumpamakan *hacktivism* sebagai "*the marriage of political activist and computer hacking*." Disertasi yang bertujuan untuk mengurai tali pengikat antara dunia hacking dan aktivitas politik itu melihat bagaimana kemajuan teknologi dengan bermunculannya hackers yang memiliki *concern* terhadap politik sebagai bentuk partisipasi politik di era modern. Sementara Graham Meikle sebagaimana dikutip dari *Hacking Global Justice* mendefinisikan *hacktivism* jauh lebih detail sebagai:

"an engaged politics which seeks solutions in software in the search for a specific technological fix to a social problem. So it refers to any use of computer technology for political ends, including diverse on-line practices: cross-border: information sharing, action planning and coordination via personal emails: chat rooms and electronic distribution list."

Hacktivism adalah suatu kepedulian politik aktivis cyber yang dibangun atas kesadaran para pelakunya. Pola gerak para aktivis-aktivis cyber tersebut selain dilandasi prinsip dasar seorang hacker tentang kebebasan juga pengetahuan dan wawasan mereka mengenai konstalasi politik global. Melalui "The Hacktivism Declaration" cDc menegaskan "*we will study ways and means of circumventing state sponsored censorship of the Internet and will implement technologies to challenge information rights violations.*"

THAT STATE-SPONSORED CENSORSHIP OF THE INTERNET IS A SERIOUS FORM OF ORGANIZED AND SYSTEMATIC VIOLENCE AGAINST CITIZENS, IS INTENDED TO GENERATE CONFUSION AND XENOPHOBIA, AND IS A REPREHENSIBLE VIOLATION OF TRUST. (Hacktivism and Cult of the Dead Cow 2001)

Hackers' Convictions dan Kontroversinya

Sebelum publik jauh menterjemahkan *hacktivism* dalam prakteknya penting untuk kembali kepada pemahaman dasar tentang aktivitas hackers dan prinsip-prinsip yang mereka yakini, mempertimbangkan arus informasi yang sampai kepada kalangan publik tidak selamanya

dapat dibenarkan. Ada satu hal yang menggelitik ketika dalam sebuah wawancara online dengan Al-Jazeera, seorang professor Jurnalistik di Mesir menyebut hacker sebagai ‘a semi-criminal.’ Pandangan seperti inilah yang umum sampai kepada telinga masyarakat, padahal sesungguhnya hacker adalah hacker, seseorang yang memahami komputer dan jauh mengeksplorasi pengetahuan dan keahliannya untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah teknis. Mereka dapat menjadi kriminal jika melakukan aksi-aksi kriminal, sama halnya dengan professor atau dokter yang juga dapat menjadi kriminal jika melakukan aksi-aksi kriminal. Satu prinsip penting hackers dalam aktivitas-aktivitas mereka adalah bahwa mereka meyakini tentang peran krusial mereka sebagai promotor kebebasan informasi melalui dunia cyber. Peran ini lah yang kadang menjerumuskan hackers kedalam aksi kriminal sebagaimana dalam aktivitas *hacktivism* yang dapat digolongkan atas legal dan illegal.

Legal atau illegalnya aksi hacking komputer memang masih sebuah isu bergerak dalam dunia maya dan *real*, dimana upaya mengkodifikasi hukum-hukum cyber masih terus menuai kontroversi ketika bersentuhan dengan prinsip kebebasan informasi dan berekspresi. Namun demikian dalam pandangan dasarnya aksi-aksi *hacktivism* berupa *site defacement*, *Denial of Service (DoS)* sampai *political cracker* berupa perusakan website misalnya digolongkan illegal karena sifatnya yang merusak dan merugikan korban. Sementara *virtual sit-ins* digolongkan aksi legal yang lebih bersifat persuasif dengan melibatkan pengguna-pengguna internet secara global sebagai bentuk kesadaran pribadi. Aksi *virtual sit-ins* dianggap merefleksikan prinsip demokrasi dalam dunia maya, dimana para pengguna internet diundang untuk turut mendukung satu aksi *hacktivism* seperti melakukan *voting* politik.

Ide-ide dasar aktivitas *hacktivism* sesungguhnya adalah tentang kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, memperjuangkan hak asasi manusia (HAM), hingga mempromosikan satu pandangan politik individu atau kelompok. Bagi *hacktivist*, setiap aksi yang mereka lakukan dilandasi oleh prinsip-prinsip kemerdekaan yang mereka yakini sebagaimana Steven Levy dalam bukunya *Hackers (1984)*: informasi harus bebas, menolak otoritas dan mempromosikan prinsip distribusi. Dalam *the Conscience of Hackers*, the Mentor yang dikenal sebagai ‘bapak hacker’ sudah terlebihdahulu mempromosikan pembelaan atas aktivitas hacker dan tuduhan kriminalitas. Manifesto yang dicetuskan tersebut sangat bernuansa pemberontakan terhadap kenyataan dunia modern.

“...tapi bagi kalian kami penjahat. Kami adalah penjahat, sedangkan kalianlah yang membuat bom nuklir, mengobarkan peperangan, membunuh, berbuat curang, berbohong, dan berusaha membuat kami percaya bahwa itu semua demi kebaikan kami. Ya aku adalah penjahat. Kejahatanku adalah keingintahuanku. Kejahatanku adalah menjadi lebih pintar dari kalian, sebuah dosa yang tidak akan bisa kalian ampuni... Kau bisa menghentikan satu, tapi kau tak akan bisa menghentikan semuanya....”

Sementara *manifesto of hackers* versi Mckenzie Wark menekankan “*whatever code we hack, we create the possibility of new things entering the world.*” Aktivitas hacking memang secara umum melahirkan trobosan-trobosan baru dalam dunia komputer dan internet, namun bagi sebagian kalangan kondisi tersebut mengacu kepada apa yang disebut ‘kebablasan teknologi.’ Dengan menggunakan pendekatan filsafat misalnya, “*A Question about Technology*” sebuah literatur paling populer dalam memahami kemajuan teknologi dengan pendekatan filsafat. Dalam buku yang sering menjadi referensi tersebut, Heidegger sang filsuf abad modern melihat kemajuan teknologi sebagai sebuah ‘sinyal’ yang menghancurkan batas-batas kemanusiaan, atau dalam istilah Borgmann ‘komputer sebagai produk *hyperintelligen.*’ Namun demikian persoalan apakah aktivitas komputer dan penggunaannya sudah melampaui batas-batas moral-kemanusiaan sesungguhnya adalah sesuatu yang begitu abstrak untuk dijelaskan ketika mereka bersentuhan dengan politik, sama halnya dengan politik itu sendiri.

Ted Julian dari Yankee Group menilai perkembangan *hacktivism* melalui sepenggal kalimatnya “*when we look back years from now we'll see this as a tipping point in 'hactivism' going from largely a theoretical threat to something that's more a day-to-day issue.*” Sementara jika aksi-aksi aktivis cyber bagi beberapa kalangan dinilai sebagai bentuk aksi terorisme, Conway berargumentasi:

“Hacktivists, although they use the Internet as a site for political action, are not cyberterrorists either. They view themselves as heirs to those who employ the tactics of trespass and blockade in the realm of real-world protest. They are, for the most part, engaged in disruption not destruction.”

Wikileaks dan Keyakinan Hacktivists

Marshall McLuhan pernah mengungkapkan sebagaimana dikutip Klein “*World War III would be a guerilla information war with no division between civilian and military participation.*” Ungkapan tersebut seolah menjadi kenyataan menutup tahun 2010 ketika fenomena wikileaks akhirnya mencuat ke permukaan dengan keterlibatan ahli IT militer AS pratu Bradley Manning. Apa yang menjadi alasan Manning terkait aksinya mensuplai dokumen-dokumen rahasia AS kepada wikileaks sesungguhnya adalah apa yang diyakini kaum hackers. Ia mengakui perbuatannya dilandasi sebuah keyakinan bahwa suatu data terkait publik luas adalah milik umum dan karenanya informasi harus bebas diperoleh oleh publik.

Didirikan 2006, setelah empat tahun wikileaks akhirnya menempati *headline* utama nyaris disetiap media internasional, bahkan beberapa dari mereka menggolongkan pemberitaan wikileaks sebagai isu terpopuler sepanjang 2010. Yang menarik dari wikileaks adalah sosok misterius Julian Assange yang berpendirian kuat dan berani mengambil resiko yang membahayakan dirinya terkait kerja-kerja wikileaks. Kiranya pendirian sang *founder* yang

juga hacker-jurnalis tersebut terefleksi dari sebuah keyakinan sebagaimana ia menulis dalam blog pribadinya:

“A man in chains knows he should have acted sooner for his ability to influence the actions of the state is near its end. To deal with powerful conspiratorial actions we must think ahead and attack the process that leads to them since the actions themselves can not be dealt with.

Sementara kelompok hackers pendukung wikileaks menyatakan dukungan mereka sebagaimana mereka meyakini prinsip kebebasan.

"We're against corporations and government interfering on the internet," Coldblood added. "We believe it should be open and free for everyone. Governments shouldn't try to censor because they don't agree with it. Anonymous is supporting WikiLeaks not because we agree or disagree with the data that is being sent out, but we disagree with any form of censorship on the internet. If we let WikiLeaks fall without a fight then governments will think they can just take down any sites they wish or disagree with."

Para pelaku *hacktivism* menyatakan bahwa dalam berkontribusi terhadap dunia, maka yang mereka lakukan adalah melakukan apa yang mereka bisa, menggunakan keterampilan yang mereka punya. Suatu aktivitas yang semakin mengkrucut memunculkan istilah-istilah seperti *'hacking global justice'* dan *'human right hacking'*, hingga *'high-tech politics'* ini memperlihatkan suatu fenomena bagaimana aktivitas hacking semakin mewarnai konstalasi politik global dan memberikan suatu wajah baru tentang keterlibatan publik dan dunia modern. Kiranya apa yang menjadi isi kepala kaum *hacktivist* dapat terefleksikan melalui kalimat berikut: “ketika pemerintah-pemerintah di dunia memilih cara perang, berlomba-lomba membangun kekuatan nuklir, dan menciptakan pembohongan publik dengan dalih memberikan damai pada bumi, maka setiap hacker pun berhak memilih cara hacking dengan dalih memberikan damai pada bumi.”

Kontribusi Politik Global

Di Era modern sebagaimana Naomi Klein mengungkapkan *'hacking computer'* menjadi *'new tool'* dalam dunia politik. Klein menulis *“imagine if computer hackers, the daredevils of the networked world, suddenly became principled political activists.. if they had a mission besides breaking and entering; if they had more to prove than that they are smarter than whoever designed your computer system, if their targets were selected as part of well organized, thoroughly researched, international human rights campaigns”* sebagai kalimat pembuka artikelnya. Klein bisa jadi mengajak publik untuk memulai dengan berimajinasi, merefleksikan ungkapan sang filosofi yang juga bapak ekonomi Adam Smith *“the greater our imagination,*

the wider our scope for acting for placing ourselves within a perceived order.” Kenyataan hari ini dikaitkan dengan kasus wikileaks memperlihatkan ajakan berimajinasi Klein menempatkan manusia pada posisi yang semakin mapan dalam profesinya.

Kontroversi wikileaks sesungguhnya mendorong dunia hari ini menjadi semakin hidup dengan semakin bergairahnya jurnalisme-investigasi, semakin aktifnya publik dalam merespon konstalasi politik global ditandai dengan semaraknya *comment-comment* berkualitas terkait wikileaks yang terpublish di berbagai media, blog pribadi sampai organisasi, serta suatu kenyataan bahwa pemerintah-pemerintah dunia didorong untuk mengoreksi diri baik perbaikan sistem keamanan komputer, etika diplomasi sampai isu ‘*open government.*’ Hal yang paling fundamental adalah menterjemahkan kembali makna kebebasan yang berujung kepada mentelaah lebih dalam prinsip-prinsip ‘demokrasi.’

Keck dan Sikkink dalam *Activists Beyond Borders*, sebuah riset tentang *the rise of transnational networks of activists* memperlihatkan dalam temuan mereka: “*advocacy networks are helping to transform the practice of national sovereignty and an important part of an explanation for changes in world politics. These networks try not only to influence policy outcomes, but to transform the terms and nature of the debate.*” Temuan riset ini memperlihatkan bahwa aktivitas-aktivitas lintas negara berupa jejaring luas seperti yang dirakit melalui internet mempengaruhi proses kebijakan serta mentransformasikan gagasan-gagasan tentang politik global hari ini. Kerja *hacktivist* melalui aktivitas *hacking-politik*nya dalam perkembangannya telah memberi suatu bentuk tersendiri terhadap konstalasi politik global.

Dengan demikian merefleksi wikileaks sesungguhnya adalah melihat suatu kenyataan bahwa koneksi global yang melibatkan para aktivis cyber telah memberikan wajah baru bagi politik dunia hari ini dan yang akan datang. Karenanya dalam frame ilmu politik, fenomena wikileaks ataupun aksi *hacktivism-hacktivism* lainnya adalah satu bentuk keterlibatan politik masyarakat civil (partisipasi politik) di dunia modern dalam konstalasi politik global. Dengan demikian *hacktivism*, keberadaan *whistleblower* sesungguhnya hanyalah sebagian dari ‘*tools*’ yang dianggap dapat mencapai tujuan-tujuan politik dengan melibatkan kalangan publik, sebagaimana pernah diungkapkan Klein.

Wikileaks bisa saja dimusnahkan hari ini juga dan Julian Assange dikirim ke Guantanamo dengan mudah, tapi ‘jiwa’ yang mengakar dalam diri para aktivis cyber dapat memunculkan ribuan organisasi *whistleblower* yang sama dan melahirkan jutaan Julian Assange-Julian Assange yang lain. Yang masyarakat dunia perlu lakukan hari ini adalah terus belajar tentang bagaimana berkontribusi dengan keterampilan yang mereka punya, bahwa setiap individu sesungguhnya bisa merubah dunia, *hack the planet* dan bebaskan dunia ini.

Dunia Setelah WIKILEAKS

Ketika memperdebatkan demokrasi modern, sungguh aku mencium aura kebebasan di udara. Apakah hacktivist, jurnalis atau filsuf yang mencita-citakan sebuah dunia masa depan yang damai dapat menggunakan hak-hak mereka untuk berekspresi, berpartisipasi secara bebas melalui ruang-ruang publik yang mereka yakini. Publiknya lah yang layak menilai apakah cara-cara mereka memenuhi etika, karena dalam ruang demokrasi otoritas sesungguhnya adalah 'opini publik.

Sementara Rick Cook sang hacker-jurnalis dalam novel populernya *Wizardry Compiled* menekankan *"it is never the technical stuff that gets you in trouble. It is the personalities and the politics"* Jean-Jacques Rousseau sudah terlebih dahulu menegaskan *"politics is neither religion nor morality."* Dari dua kutipan tersebut kita dapat mengambil sekilas 'pesan' terkait kasus the whistleblower wikileaks yang menghebohkan dunia baru-baru ini setelah diterbitkannya kabel diplomasi AS serta kasus penyelewengan seksual Julian Assange sang pendiri organisasi pembocor dokumen rahasia-rahasia negara tersebut.

Kontroversi Wikileaks

Sebagai isu hangat penutup tahun 2011, setelah nyaris menarik perhatian seluruh penduduk bumi, fenomena wikileaks kemudian mendorong prinsip-prinsip tentang *freedom, openness, transparency*, muncul kembali ke permukaan, diperdebatkan hingga mengkrucut menjadi isu tentang mempertanyakan demokrasi. Dalam pembahasan seputar wikileaks paling tidak tercatat beberapa isu penting: cyber-world, jurnalisme-investigasi, pemerintah dan prinsip demokrasi.

Dalam kalimat pembuka artikel *"Wikileaks and Press Freedom* yang dipublikasikan media online German Der Spiegel, sang komentator Thomas Darnstädt secara jelas menyatakan *"the hunt for WikiLeaks is a greater danger to democracy than any information that WikiLeaks might reveal."* Ketika persoalan wikileaks memuncak maka pertanyaan adalah apakah benar ancaman terhadap wikileaks sama dengan mengancam demokrasi dan kebebasan pers.

Wikileaks memang menuai kontroversi terkait eksistensi organisasi yang melibatkan banyak pihak dalam kerjanya ini. Tidak sebatas para pelaku cyber (hacktivist), jurnalis dan news media, pemerintah-pemerintah dunia, korporasi-korporasi global, militer, akademisi-intelektual, serta yang terpenting adalah kalangan publik. Fenomena wikileaks adalah sebuah babak baru abad modern dimana kemajuan teknologi cyber berkolaborasi dengan dunia pers mencita-citakan suatu perubahan. Wikileaks adalah dilema yang harus segera

dipecahkan” sebagaimana artikel “Wikileaks dan Kerentanan Global” di salahsatu media nasional Jakarta.

Memecahkan kasus wikileaks sama seperti halnya meng-*disassembler* ratusan bahkan ribuan kode dalam bahasa pemrograman komputer, tampak sulit, namun satu kuncinya adalah ‘koneksi’ menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dan menemukan ‘*line*’ diantara mereka. Organisasi whistleblower ini didukung oleh komunitas cyber dipelosok dunia yang mensuplainya dengan dokumen-dokumen hasil bocoran dan bekerjasama dengan media-media international. Wikileaks paling tidak terkoneksi secara simultan dengan lima media berkelas international, *The Guardian* (UK), *The New York Times* (US), *Der Spiegel* (Jerman), *La Monde* (Perancis), dan seperti yang baru-baru ini diberitakan dengan surat kabar Russia *Novaya Gazeta*. Mekanisme kerja wikileaks adalah mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia negara yang kemudian dapat diakses secara bebas oleh publik dan atas kerasama wikileaks dengan beberapa media, dokumen tersebut dijadikan *sources* untuk analisis dan kerja jurnalisme investigasi.

Sang ‘Messagger’ Julian Assange

Ketika menyebut wikileaks, satu sosok fenomenal yang nyaris menyabet gelar ‘*2010’s man of the year*’ versi majalah TIME muncul, sang Australian Julian Assange. Dunia international mengenalnya sebagai pendiri whistleblower kontroversial yang menuai kontroversi luas setelah diterbitkannya dokumen-dokumen penting “Kabel Diplomasi AS.” Sarah Palin boleh saja menyamakan sosoknya dengan Osama, menyerukan kepada Amerika bahkan kepada dunia untuk memburunya. Namun bagi para pendukungnya Assange bagaikan ‘*the Real Angel*’ sang dewa teknologi, ‘si modern Robinhood,’ ‘tangan Tuhan,’ ‘sang pembawa pesan.’ Assange dalam beberapa biografi yang tersebar disebut sebagai sosok cerdas yang ketika muda sudah berhubungan dengan dunia hacking komputer. Sosok yang berpendirian kokoh ini melihat pemerintah modern sebagai konspirasi dan eksistensi dari kekuatan otoritarian. Kerja-kerja wikileaks sebagaimana ia yakini diharapkan dapat mendorong prinsip keterbukaan dan paling tidak menekan sikap represif Pemerintah otoritarian. Keyakinannya sebagaimana tersurat dalam kutipan berikut:

“To radically shift regime behavior we must think clearly and boldly for if we have learned anything, it is that regimes do not want to be changed. We must think beyond those who have gone before us, and discover technological changes that embolden us with ways to act in which our forebears could not. Firstly we must understand what aspect of government or neocorporatist behavior we wish to change or remove. Secondly we must develop a way of thinking about this behavior that is strong enough carry us through the mire of politically distorted language, and into a position of clarity. Finally must use these insights to inspire within us and others a course of ennobling, and effective action.” (Julian Assange, “State and Terrorist Conspiracies”)

Demokrasi dan Pendewasaan Global

“In a democracy, citizens pass judgment on their government, and if they are kept in the dark about what their government is doing, they cannot be in a position to make well-grounded decisions. Even in non-democratic countries, people have a legitimate interest in knowing about actions taken by the government... We could, however, try to get closer to that ideal. If governments did not mislead their citizens so often, there would be less need for secrecy, and if leaders knew they could not rely on keeping the public in the dark about what they are doing, they would have a powerful incentive to behave better.” (Peter Singer, Der Spiegel)

Kalimat pembuka artikel Peter Singer *“Let's hope the WikiLeaks cables move us closer to open diplomacy”* (Guardian, UK) berbunyi *“if citizens are kept in the dark about their government's activities, they cannot hold it to account.”*

Kasus wikileaks sesungguhnya menuntut kita untuk mengkaji ulang demokrasi, apakah demokrasi yang selama ini dibangga-banggakan barat (baca: disponsori Amerika) atau demokrasi versi negara-negara Timur yang lebih berorientasi sosialistik. Yang menarik dari kasus wikileaks tentu saja pembahasan mengenai kebebasan pers, kebebasan individu dan kebebasan rakyat dalam hal rakyat bebas mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintahnya. Prinsip transparansi atau keterbukaan yang seharusnya dianut pemerintah dan dituntut publik. Dalam artikel ini penulis telah mengurai isu-isu terkait kasus wikileaks untuk kemudian dirangkai menjadi satu kesimpulan, yaitu ‘pendewasaan global.’

Isu-isu seputar dunia yang dibuka wikileaks dalam bocoran-coborannya sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Analisis tentang ketakutan negara-negara Arab terhadap nuklir Iran misalnya, sudah sejak lama menjadi hipotesis para scholastik. Mereka mengungkapkan bahwa negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi mengkhawatirkan Iran yang akan muncul sebagai pemimpin Arab jika memiliki nuklir. Persoalan Arab Saudi terlibat dibalik Agresi Irak pun sudah barang umum dalam diskusi-diskusi lokal mahasiswa politik.

Pertama-tama yang perlu disepakati adalah prinsip tentang demokrasi. Apakah demokrasi yang secara general dikenal dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat-berekspresi, kebebasan pers, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik serta penegakkan *the rule of law* yang sebagaimana diyakini Berasal dari tradisi Barat sudah bulat disepakati masyarakat dunia. Apakah dalam implementasinya ada satu aturan khusus sehingga demokrasi yang diyakini berdiri pada pondasi yang sama. Jika jawabannya adalah bahwa setiap negara memiliki versi demokrasinya sendiri maka, tiap-tiap mereka harus siap menerima sebuah kenyataan bahwa dalam berdemokrasi diperlukan sikap dewasa untuk bisa menerima konsekuensi demokrasi itu sendiri.

Bagi US misalnya, kasus wikileaks bukan soal freedom dalam demokrasi melainkan suatu tindakan kriminal dengan mencuri dokumen-dokumen rahasia negara dan publikasinya terhadap dunia international justru mengancam demokrasi itu sendiri dengan menyebarkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi warga AS serta aktivitas diplomasinya. Pemerintah AS juga melihat aksi wikileaks sebagai kejahatan cyber (cyber terrorism). Bagaimanapun juga persoalan hukum mengatur kebebasan dalam dunia cyber menjadi satu isu yang selalu hangat diperbincangkan, bahkan sampai saat ini setiap negara masih selalu disibukkan dengan format lengkap dan adil aturan-aturan hukum mereka terkait dunia cyber.

Seperti halnya media-media international ataupun regional cerdas dalam menyikapi kasus wikileaks, sebagai point tersendiri ketika prinsip keterbukaan merangkak naik dalam kurva perpanjangan waktu. Hal lain yang tentu saja sangat penting adalah bahwa prinsip kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, keterbukaan dan transparansi pemerintah adalah bagian dari menengok 'demokrasi' lebih dalam. Pemerintah-pemerintah dunia pun menjadi semakin 'aware' terhadap sistem-sistem keamanan mereka termasuk strategi-strategi politik yang mungkin saat ini antri menunggu untuk perubahan demi mengamankan posisi pemerintah dalam diplomasi global. Masyarakat international hari ini sudah cukup cerdas menyikapi fenomena global termasuk dokumen-dokumen yang disebarkan wikileaks.

1. Open Government and Open Society

...the government of the world must be entrusted to satisfied nations, who wished nothing more for themselves than what they had. If the world-government were in the hands of hungry nations, there would always be danger. But none of us had any reason to seek for anything more. The peace would be kept by peoples who lived in their own way and were not ambitious. Our power placed us above the rest. We were like rich men dwelling at peace within their habitations.” (Winston Churchill)

Semakin transparan Pemerintah, semakin terlihat bagaimana *public control* bekerja. Katakanlah pemerintah berhak memiliki rahasia terkait dengan kerja-kerja politiknya, namun ketika rahasia tersebut sampai kepada publik, pemerintah harus mengoreksi diri bahwa sistem mereka memiliki kelamahan dan harus segera diperbaiki.

2. Freedom of Press

Just as it is legitimate for the state to keep information secret, it is legitimate for the press to publish information it has succeeded in obtaining from the belly of the state. If the state derives its democratic authority from citizens having comprehensive information, then providing information becomes a civic duty. And breach of secrecy becomes a mark of the quality of a democracy.

"A journalist who sees the WikiLeaks data primarily as an issue of national or, even worse, Western security, has successfully shot himself in the foot -- and dealt a blow to press freedom in the process" (Jakob Augstein, *Freitag*).

Tahun 2010 ditutup dengan nafas baru bagi kebebasan pers. Beberapa media menyebut "revolusi jurnalisme". Kasus wikileaks sesungguhnya menuntut kita untuk mengkaji ulang demokrasi, apakah demokrasi yang selama ini dibangga-banggakan barat (baca: disponsori Amerika) atau demokrasi versi negara-negara Timur yang lebih berorientasi sosialistik. Yang menarik dari kasus wikileaks tentu saja pembahasan mengenai kebebasan pers, kebebasan individu dan kebebasan rakyat dalam hal rakyat bebas mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintahnya. Prinsip transparansi atau keterbukaan yang seharusnya dianut pemerintah dan dituntut publik. Dalam artikel ini penulis telah mengurai isu-isu terkait kasus wikileaks untuk kemudian dirangkai menjadi satu kesimpulan, yaitu 'pendewasaan global.'

Fenomena wikileaks adalah pendewasaan politik global ketika jurnalisme investigasi kembali bergairah ditandai dengan konsistennya media-media internasional dalam mempublikasikan fakta-fakta dibalik kerja pemerintah. Bahwa mereka yakin publik perlu informasi, menuntut keterbukaan dan media percaya prinsip kebebasan pers tidak dibatasi kekuasaan.

FINDING DEMOCRACY (Part I) Dilemma 'Freedom' dan Otoritarian

“Aku tidak menginginkan kebebasan jika aku dapat menjadi otoritarian olehnya. Karenanya ku percayakan kebebasan itu kepada pemerintah demi menertibkannya. Sebaliknya mereka kemudian memberlakukan ribuan regulasi yang harus kupatuhi sebagaimana otoritas memerintah, hingga semua itu akhirnya berbalik mengurung kebebasanku.

Rakyat menginginkan kebebasan, karenanya dipercayakanlah kekuasaan kepada pemerintah untuk menciptakan kebebasan ditengah masyarakat yang 'chaos' karena kebebasan itu sendiri (yang dianggap kebablasan). Kenyataan pertama ini adalah latarbelakang berdirinya sebuah pemerintahan fasis-totalitarian, yaitu karena rakyat yang otoriter, sebagaimana deskripsi Polanyi.

Pemerintah diberi kewenangan, lalu memerintah dengan mengebiri kebebasan rakyat. Negara kemudian menjadi alat yang membatasi kebebasan rakyat, hingga rakyat memberontak, menentang kekuasaan dan menginginkan penghapusan negara yang otomatis melenyapkan keberadaan pemerintah. Kenyataan kedua ini adalah latarbelakang munculnya semangat anarki yang memantapkan ide-ide anarkisme dalam pandangan Bakunin.

Disisi lain, pilihan yang dianggap sebagai sebuah jalan keluar, yaitu pemerintah dipercaya untuk memegang suatu kekuasaan, diberi kewenangan oleh rakyat berupa kebebasan untuk memberikan pelayanan ketatanegaraan demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan untuk sang pemberi wewenang. Proses tersebut yang kemudian dipahami sebagai demokrasi, kekuasaan berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah.

Mempertalikan ungkapan-ungkapan diatas, idealnya demokrasi adalah kekuasaan rakyat dan menolak otoritarian. Namun kenyataan dunia modern ketika prinsip-prinsip kebebasan tersebut 'tereduksi' oleh kompleksnya persoalan rakyat, maka yang muncul sebagai kebebasan adalah mungkin 'otoritarian' itu sendiri.

Apakah dapat disimpulkan sementara bahwa rakyat yang bebas adalah rakyat yang otoriter, sementara pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang bebas?

Sebelum jauh mengeksplorasi freedom dan otoritarian, sedikit merefleksi Fromm, menurutnya kebebasan memiliki dua bentuk arti bagi manusia modern, kondisi pertama bahwa ia telah bebas dari 'traditional authorities' dan menjadi seorang individual namun pada kondisi yang lain di saat yang sama ia menjadi terisolasi, tak berdaya (*alinedated from himself and others*). Inilah tahap dimana individu dapat menjadi otoritarian.

Demokrasi antara freedom dan otoritarian

“There is only one short span of distance between freedom dan otoritarian while people never stop to pursui their liberty” (Nofia Fitri, The Philosophy Critiques of Libertarian Anarchist, 2011)

Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah demokrasi ideal dalam masyarakat yang menuntut kebebasan sementara kebebasan dapat mendorong mereka menjadi otoriter? Sebaliknya pemerintah memiliki kekuasaan yang datang dari rakyat itu sendiri, namun tugas ‘memerintah’ sesungguhnya membatasi kebebasan rakyat.

Masyarakat yang bebas adalah masyarakat yang otoriter. Sementara Pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang bebas. Meminjam ungkapan Amartya Sen karenanya ‘kebebasan haruslah diberikan sesuai porsinya.’ Lalu porsi seperti apa kah yang seharusnya diberikan kepada rakyat bentukan dunia modern sebagaimana kenyataan hari ini.

Mengambil makna dari istilah populer Dostoyevsky *‘two plus two equal to four, that is freedom’* kebebasan dalam esensinya adalah bukan rakyat sebagai satu individu, melainkan entitas lebih dari satu itu sendiri. Sebagai contoh pertemuan antara individu atau publik.

Demokrasi bersandar pada kesatuan individu, bukan pada Individu yang satu

“We can not achieve the freedom we seek, unless we comprehend the true significance of freedom in a complex society” (Karl Polanyi).

Manusia modern yang bebas adalah manusia yang terefleksi dari ide tentang kebebasan kolektif, bukan pengalaman tentang catatan masa lalu yang membawa mereka hanya bernostalgia dengan sejarah penindasan individu. Ide tentang kebebasan adalah ide tentang memerdekakan hak-hak orang lain. Kemerdekaan suatu negara dari penjajahan adalah memerdekakan suatu kesatuan individu yang bernasib sama.

Karena demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat maka pertimbangan individu (rakyat) yang kolektif atau dalam bentuk real nya bisa berupa opini publik adalah otoritas sesungguhnya dalam demokrasi. Aparat penegak hukum atau pemerintah sekalipun tidak akan dapat membatasi opini yang dibangun dari pengalaman serta kejadian dalam kehidupan manusia yang bebas.

Berangkat dari kondisi inilah kemudian kesepakatan publik terbentuk (kesepakatan individu-individu), bahwa masyarakat yang bebas beridekan tentang kemerdekaan individu untuk kemerdekaan bersama (rakyat). Karenanya dalam proses demokrasi mengakomodasi opini publik sama dengan menjalankan 'kata rakyat.'

Apakah idealnya rakyat mengikuti 'kata' pemerintah?

Demokrasi adalah pemerintah menjalankan apa yang dikatakan rakyat.

Pemerintah hari ini menjadi arogan dan otoritarian karena tidak memahami esensi demokrasi sesungguhnya. Mereka melihat demokrasi sebatas "rakyat mempercayakan kekuasaan pada sekelompok orang terpilih dengan memberi kewenangan kepada mereka untuk memerintah." Pemerintah-pemerintah di era modern lupa bahwa kewenangan tersebut adalah kekuasaan yang diamanatkan dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, digunakan sebaik-baiknya untuk mensejahterahkan rakyat, sekali lagi Pemerintah adalah Pelayan Rakyat.

Pemerintah dibentuk untuk melayani rakyat. Dengan demikian apakah demokrasi adalah dimana aku (rakyat) yang mempercayakan 'kekuasaan' kepadanya (pemerintah) untuk digunakan sebagai alat melayaniku.

Kalau demokrasi seperti ini, apakah anda (pemerintah) tetap memilih demokrasi?

FINDING DEMOCRACY (Part 2) "Demokrasi, Pemerintah dan Ruang Publik"

FINDING DEMOCRACY (Part 3) "Negara IDE: Negara Ideal Politik Masa Depan"

Internet Indonesia dan ‘*Deliberative Democracy*’

“*Thanks to the internet, government in the future will be more responsive, more efficient, and less bureaucratic.*” (Margolis & Resnick)

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa besar dengan semangat paling menyala dalam menegakkan prinsip-prinsip berdemokrasi. Alat-alat demokrasi beragam dimulai dari pemilihan umum dengan sistem multipartai, pers bebas sampai menjamurnya organisasi-organisasi sosial-politik, kelompok-kelompok penekan dan kepentingan, yang dalam prosesnya tidak terlepas dari semakin meningkatnya peran ruang-ruang publik. Ruang publik hari ini sejatinya menjadi perdebatan dalam diskursus demokrasi ketika meniti hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Diantara ruang-ruang publik yang efektif dalam penegakan demokrasi di kebanyakan negara adalah media internet.

Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat

Jika perdebatan seputar fungsi internet dalam menstimulus partisipasi politik masyarakat luas sudah sampai pada titik dimana partisipasi politik tersebut terus meningkat secara statistik dan internet dianggap sebagai ‘*a new media on political-communication and technology*’ (Price, 2010) misalnya, ‘*a new tool of democracy and political struggle*’ (Danning, 2001) atau ‘*a new public sphere for democracy*’ (Gimmler, 2001) hingga ‘*a strategic medium for socio-political transformation*’ (Nugroho, 2008).

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan kadar pencapaian dari demokrasi itu sendiri? Apakah partisipasi politik melalui media internet dimana rakyat menyalurkan aspirasi mereka bekerja efektif dalam membangun suatu peradaban masyarakat yang demokratis?

Untuk tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perkenankanlah penulis mengurai argumentasi.

Internet: Ruang Aspirasi dan Akomodasi

Dalam fenomena global, misalnya, pasca kontroversi wikleaks sebagai penutup tahun 2010, partisipasi politik global yang dianggap melibatkan banyak kalangan mencapai titik dimana diskursus demokrasi kembali menunjukkan taringnya dalam kasus organisasi whistleblower tersebut. Namun seberapa besar bentuk partisipasi politik global akhirnya dapat memberi

iklim baru terhadap tatanan politik dunia terpatahkan, karena para aktor politik (dari negara-negara terlibat) tidak melihat bentuk partisipasi melibatkan teknologi hacking computer tersebut sebagai aspirasi rakyat yang harusnya diakomodasi (mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan komunitas global tentang suatu pemerintahan yang transparan, kebebasan informasi dan internet, serta terbentuknya suatu masyarakat yang terbuka atau 'open society') melainkan lebih kepada menjadikannya sebagai alasan untuk menegok kembali undang-undang cyber.

Dalam kasus Indonesia, salah satu contoh, baru-baru ini terjadi aksi-aksi defacement web .go.id dimana para pelaku meninggalkan pesan-pesan yang sebenarnya tidak lain adalah aspirasi mereka, namun sayangnya persoalan tersebut kemudian hanya melulu dikaitkan dengan cyber criminal. Sementara itu setiap element yang terlibat didalamnya kelihatannya lupa bahwa aksi-aksi hacking-politik juga berangkat dari motif si pelaku yang mencari ruang-ruang publik sensitif untuk menyampaikan aspirasi mereka agar didengar.

Satu point penting yang saya garis bawahi dari kasus-kasus diatas, bahwa internet hari ini memang telah berfungsi aktif dalam menstimulus partisipasi politik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, namun belum dimaksimalkan fungsinya dalam mengakomodasi aspirasi-aspirasi tersebut untuk kemudian terealisasikan kedepannya.

Kegagalan Demokrasi Representasi

Pertimbangan lain adalah demokrasi representasi yang 'gagal' di tanah air dimana rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada wakil-wakil mereka di lembaga legislatif yang seharusnya berfungsi menyuarakan aspirasi konstituen justru lebih efektif sebagai wakil-wakil golongan yang memiliki kepentingan-kepentingan diluar kebutuhan rakyat, melainkan kebutuhan kendaraan politik mereka (baca: partai politik).

Karenanya budaya politik Indonesia yang semakin mencuat ke permukaan adalah rakyat 'frustasi' karena aspirasinya tidak didengar atau terakomodir, bahwa partai politik memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya. Meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap peran-peran intitusi-institusi politik (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Parpol) dalam menyalurkan aspirasi harus dieliminir dengan lebih aktif memanfaatkan ruang-ruang publik seperti internet menjadi 'alat pertimbangan politik' untuk mewujudkan demokrasi.

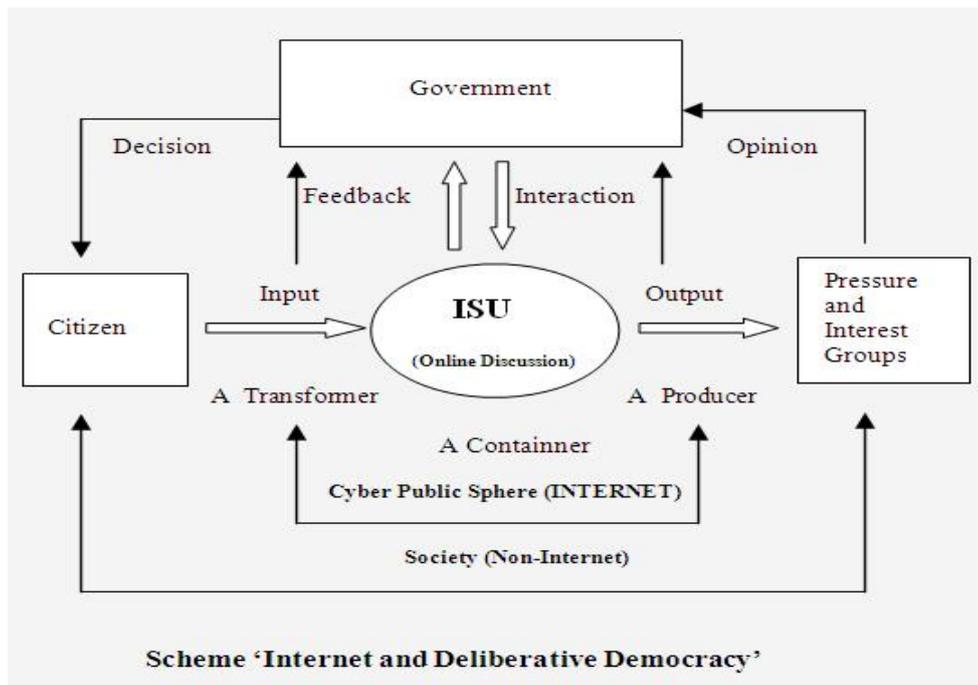
Deliberative Democracy dan Internet

Saya kemudian mencoba mengidentifikasi, secara garis besar tidak terdapatnya satu proses pertimbangan publik yang mempertemukan antara internet user dengan pihak berkepentingan (pemerintah) dalam membahas satu isu lewat media internet.

Konsepsi *deliberative democracy* dalam pandangan saya sesungguhnya dapat menambal-sulam kegagalan-kegagalan dari *representative democracy*. Karenanya internet yang hari ini menjadi fasilitas penting dalam menyuburkan ide-ide, diskursus, hingga praktek demokrasi haruslah dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan publik.

Pertimbangan publik dalam arti suatu ruang dimana internet users (rakyat) bertemu dalam satu media online dengan pihak-pihak terlibat katakanlah pemerintah untuk mendiskusikan satu isu, menyampaikan aspirasi lalu menemukan konsensus antara kedua belah pihak, untuk kemudian dapat terakomodasi demi menghasilkan output berarti. Hal ini lah yang kemudian dipahami sebagai demokrasi deliberatif via internet.

Dalam prakteknya demokrasi pertimbangan melalui media internet dapat dideskripsikan melalui tiga peran internet dalam mewujudkan satu ruang publik yang dapat mempertemukan antara rakyat dengan pemerintah. Pertama, internet sebagai '*a transformer*', melalui internet para user (pemerintah dan rakyat) mentransformasikan ide-ide mereka secara bebas mengacu kepada prinsip-prinsip demokrasi: kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berafiliasi. Dengan demikian internet menjadi 'alat' memindahkan ide dari individu ke ruang publik. Kedua, internet sebagai '*a container*', melalui internet 'ide' atau 'isu' dikonsensuskan, demi menemukan satu kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, karenanya internet berfungsi sebagai wadah untuk penggodokan isu (opini, ide, saran, kritik, dll). Ketiga, internet sebagai '*a producer*', melalui internet, keputusan-keputusan yang mempertimbangkan komunikasi dan diskusi antara Pemerintah dan Rakyat diharapkan menghasilkan satu 'kesepakatan' (*agreement*) yang nantinya akan menjadi salah satu referensi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan (*decision making*).



E-Government: Open Technology for Open Society

Untuk bisa merealisasikan fungsi-fungsi internet dalam mewujudkan deliberative democracy haruslah terlebih dahulu menteknologikan pemerintah itu sendiri melalui konsep e-government.

Konsep e-government selalu menjadi acuan banyak negara di dunia demi mewujudkan satu pemerintah yang terbuka, efektif dan efisien. Dalam hal ini e-government berujung kepada cita-cita open-society. Namun dalam mewujudkan satu e-government untuk open society, teknologi yang menjadi sarana itu sendiri harus terlebih dahulu dibebaskan, disosialisasikan secara merata, dapat dijangkau dan dimanfaatkan semua kalangan. Hal ini lah yang dikenal dengan *open technology*. '*Open technology*' atau konsep teknologi terbuka adalah dimana teknologi dapat dikembangkan dan diakses oleh setiap kalangan dari kaum elite sampai masyarakat biasa yang ditandai dengan transparansi, kebebasan menginovasi serta pembuatan kebijakan yang berbasis kepada '*technical merit*.'

'*Open Technology*' inilah yang nantinya akan mewujudkan suatu masyarakat yang terbuka '*Open Society*' dengan memaksimalkan peran Internet Indonesia sebagai '*Tool of Democracy*' yaitu dengan cara mengaktifkan peran-peran Internet sebagai 'alat pertimbangan' dalam menghasilkan satu keputusan. Salahsatunya dengan mengefektifkan e-government dan civil online deliberation.

Dalam upaya menjadikan internet Indonesia sebagai 'alat pertimbangan politik' untuk menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah yang bisa direalisasikan salah satunya bisa dengan metode-metode teknis misalnya memproses ide-ide masyarakat civil yang tertuang melalui fasilitas-fasilitas di internet, seperti online opini publik dengan teknologi computer yang sudah maju.

Mengambil pelajaran dari sukses '*Minnesota E-Democracy*' misalnya, untuk kasus Indonesia deliberative democracy nantinya dapat bekerja tidak hanya sebatas mewedahi partisipasi politik user melainkan juga untuk menghasilkan suatu output demi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (*decision making*) yang idealnya dapat melibatkan rakyat secara langsung tanpa mengindahkan peran representasi politik para wakil rakyat itu sendiri.

Dengan demikian konsep *deliberative democracy* dan internet masa depan akan dapat menjawab persoalan 'krisis kepercayaan politik' di Indonesia dengan lebih meningkatkan peran internet sebagai media 'alat pertimbangan' antara rakyat dengan pemerintah.

Untuk Indonesia dari Generasi Teknologi

Surat Terbuka Untuk Indonesia

Ide Kapal Perubahan

Kekuatan 'ide' adalah 'power' untuk merubah bangsa sementara masa depannya berada dipundak generasi muda. Anak Muda terlahir dalam takdir mereka sebagai Kapal Perubahan yang dibekali ide-ide brilian untuk Merubah DUNIA. Tanpa adanya bimbingan dari generasi pendahulu, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa awak yang seharusnya mengarahkan mereka. Tanpa adanya dukungan dari segenap masyarakat, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa dermaga yang seharusnya menjadi labuhan mereka. Tanpa adanya pengaruh dari konstalasi sosial-politik di sekitar mereka, anak muda hanya akan menjadi kapal besar tanpa angin yang seharusnya menggerakkan mereka.

Fakta INDONESIA

Budaya politik Indonesia yang semakin mencuat ke permukaan adalah rakyat 'frustasi' karena aspirasinya tidak didengar atau terakomodir, bahwa kendaraan-kendaraan politik (baca: partai politik) hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan golongan.

Semakin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap peran-peran intitusi-institusi politik (baca DPR dan Partai Politik) dalam menyalurkan aspirasi harus dieliminir dengan lebih aktif memanfaatkan ruang-ruang publik semacam internet menjadi 'alat pertimbangan' sebagai alat mewujudkan demokrasi.

Hacking Tanah Air

Belajar dari serentetan panjang kasus defacement go.id oleh hacker-hacker muda tanah air, pemerintah haruslah lebih fokus tidak melulu kepada isu kriminalitas cyber, melainkan kepada pesan-pesan yang tertuang dalam aksi-aksi tersebut, bahwa user/pengguna internet/si pelaku mencari ruang untuk bisa mengekspresikan pandangan mereka.

Tantangan INTERNET Indonesia

Karenanya internet masa depan harus mampu menjawab persoalan 'krisis kepercayaan' dengan lebih meningkatkan perannya sebagai 'alat pertimbangan' antara rakyat dengan pemerintah. Mungkin sampai saat ini internet bisa dikatakan sebagai salau satu ruang publik yang bebas, dimana rakyat dapat mengekspresikan diri tanpa melalui tahapan-tahapan sensor.

Pemerintah dan GENERASI MUDA

Indonesia adalah bangsa potensial yang generasi mudanya percaya bawa kelak bangsa ini akan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. Karenanya pemerintah harus meningkatkan concern mereka kepada pembangunan generasi muda.

INDONESIA Adalah Bangsa 'MENYALA'

Indonesia adalah bangsa dengan semangat paling menyala dalam menegakkan demokrasi. Alat-alat demokrasi beragam dimulai dari sistem multipartai, pers bebas sampai kebebasan ruang-ruang publik dengan menjamurnya organisasi-organisasi sosial dan kepentingan. Ruang publik sejatinya selalu menjadi perdebatan dalam kajian demokrasi ketika meniti hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Diantara ruang-ruang publik yang efektif dalam penegakan demokrasi di kebanyakan negara, khususnya negara berkembang adalah media internet.

Kami tersulut ketika mereka menyebut bangsa kami BANGSA KORUPTOR

Kami terbakar ketika mereka menyebut bangsa kami BANGSA Politisi Busuk

Kami terlebur ketika mereka menyebut bangsa kami BANGSA Lintar Darat Penghisap RAKYAT

Tapi bagi kami....

INDONESIA adalah BANGSA Menyala!!!

Terus TERBAKAR demi Memberi SINAR pada DUNIA

Hancurkan saja strukturnya dan bangun kontruksi baru...

Haruskan seperti itu INDONESIA?

Musnahkan saja penguasanya dan lahirkan pemimpin baru...

Haruskan seperti itu INDONESIA?

Potong saja generasi tuanya dan munculkan generasi muda baru...

Haruskan seperti itu INDONESIA?

Kami tidak menginginkan Perubahan dengan Kekerasan, kami ingin perubahan yang terkordinasi melibatkan segala lapisan masyarakat tanpa harus mencecerkan darah.

Kami hanya menginginkan perubahan menuju Indonesia yang diimpikan segenap rakyatnya.

Karenanya dengan kepala tertunduk kami persembahkan:

“INDONESIA OPEN TECHNOLOGY FOR OPEN SOCIETY”

JAKARTA, Hari Teknologi INDONESIA 2011

“Saatnya HACKER Muda Merubah DUNIA, Karena di Dada Kita Ada GARUDA, Save the World, Hack the Planet, Free the Universe”

Generasi Teknologi Merah Putih

From Hacker to Hactivist

Oleh: Nofia Fitri

Dunia modern menyulap bumi dimana kita tinggal tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang terikat secara normative dan formatif. Segala aktivitas manusia kemudian saling bertautan satu sama lain. Tidak ada jarak, tidak ada limit, dan tidak ada garis yang membuat manusia terpisah selain oleh waktu.

Apakah hacker, jurnalis atau filsuf yang mencita-citakan sebuah dunia masa depan yang damai dapat menggunakan haknya untuk berekspresi secara bebas melalui ruang-ruang publik yang mereka yakini. Publiknya lah yang layak menilai apakah cara-cara mereka memenuhi etika, karena pemerintah sendiri pun masih harus memperoleh pantauan langsung dari rakyatnya untuk kemudian mendapat klaim apakah mereka layak atau tidak. Pemerintah tidak akan menjadi lumpuh karena *public control*, justru semakin terdorong untuk mereposisi keberadaan mereka.

Terdapat dikotomi yang jelas antara mereka yang memahami komputer sebagai alat untuk merusak dan memahami komputer sebagai alat untuk memperbaiki, dalam satu kondisi yang berbeda komputer juga berguna untuk mempreteli.

Seni Hacking Computer & Hyperintelligen

Aktivitas hacking memang secara umum melahirkan trobosan-trobosan baru dalam dunia komputer dan internet, namun bagi sebagian kalangan kondisi tersebut mengacu kepada apa yang disebut 'kebablasan teknologi.' Dengan menggunakan pendekatan filsafat misalnya, "*A Question about Technology*" sebuah literatur paling populer dalam memahami kemajuan teknologi dengan pendekatan filsafat. Dalam buku yang sering menjadi referensi tersebut, Heidegger sang filsuf abad modern melihat kemajuan teknologi sebagai sebuah 'sinyal' yang menghancurkan batas-batas kemanusiaan, atau dalam istilah Borgmann 'komputer sebagai produk *hyperintelligen*.'

Menyelami Sosok 'Hacker'

Untuk memahami secara dalam bagaimana pribadi seorang hacker tidaklah mudah sekalipun bagi seseorang yang sudah memperoleh gelar professor setelah sejejeran tingkat pendidikan yang berhasil diraihinya. Setiap orang bisa saja terpeleset dalam konotasi negatif dan menutup mata dari sebuah konsep-konsep akademik yang secara jelas sudah mengkategorikan hacker dalam posisi-posisi yang berbeda.

"*Do it yourself*" bagi kalangan pecinta komputer "geek" yang banyak menghabiskan waktu mereka mengoprek-ngoprek barang maya sudah menjadi prinsip mendarah daging. Istilah *Do it yourself* sendiri adalah istilah baku dalam ideology anarkisme, suatu ideology yang dalam konsepsi politik dipahami sebagai kepercayaan tentang tidakperlu adanya Negara dimana otorites tertinggi adalah masing-masing individu.

Hactivist: Partisipasi Politik?

Dalam disertasi menarik doktoral ilmu politiknya di Harvard yang dipublish secara bebas melalui website pribadi, Alexandra Samuel mengumpamakan hactivism sebagai “the marriage of political activist and computer hacking.” Desertasi yang bertujuan untuk mengurai tali pengikat antara dunia hacking dan aktivitas politik itu tak tanggung-tanggung dibimbing oleh professor yang sangat tidak asing bagi mahasiswa ilmu politik, Sidney Verba.

la melihat bagaimana kemajuan teknologi dengan bermunculannya hackers yang memiliki concern terhadap politik sebagai bentuk partisipasi politik di era modern. Partisipasi politik tidak lagi didefinisikan sebatas memberikan suara pada pemilihan umum atau menjadi anggota partai.

Hactivists untuk DUNIA

Dunia menutup mata seolah tidak melihat bahwa kekuasaan mampu membenamkan rasa kemanusiaan dan kecerdasan hacker dapat digunakan untuk membendung kekuasaan ketika demokrasi ternodai karena tidak ada lagi penghargaan terhadap suara-suara rakyat.

Bagaimana hukum dapat mengatur kebebasan dalam dunia cyber menjadi satu isu yang selalu hangat diperbincangkan, bahkan sampai saat ini setiap negara masih selalu disibukkan dengan format lengkap dan adil aturan-aturan hukum mereka terkait dunia cyber. Sejak ratusan tahun lalu perihal spionase adalah hal lumrah dan urusan mematai-matai negara bahkan disosialisasikan dalam film-film action yang secara mudah dikonsumsi publik.

Pada akhirnya kita sampai kepada sebuah tahapan bahwa teori-teori hubungan international harus direvisi dengan mempertimbangkan keterlibatan teknologi dalam memunculkan suatu fenomena.

Jika mereka dikirim ke dunia bukan untuk menjadi tangan Tuhan dan melakukan apa yang disebut dengan kerja Tuhan, maka mereka sangat layak disebut sebagai ‘dewa teknologi’ yang menginjakkan kakinya di bumi untuk menciptakan damai, bukan dengan merusak melainkan memperbaiki sistem-sistem bobrok yang mengagungkan perang dan membiarkan penindasan.

Mereka berfikir jauh lebih dalam tentang apa itu keadilan dan kebebasan. Tentang mimpi-mimpi mereka dalam menciptakan dunia yang damai. Bahwa diluar sana keadilan harus ditegakkan dan semua dimulai dari sentuhan tangan orang-orang cerdas.

Jika seorang hacker memiliki fikiran murni seorang ‘extra-ordinary’ yang dianugrahi kemampuan untuk merubah dunia dengan kecerdasan mereka, jika hackers memiliki hati suci seorang ‘extra-ordinary’ yang dianugrahi kemampuan untuk merubah dunia dengan kecerdasan mereka.

Mereka dapat membentuk dunia dengan persepsi mereka...

Cyber Politics:

Perang Dunia Maya dan Tantangan Dunia Masa Depan



Aksi-aksi Perang Dunia Maya/Perang Cyber (Cyber Warfare) yang melibatkan negara-negara berkekuatan raksasa dunia disinyalir sebagai Perang Modern di masa yang akan datang. Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Israel adalah negara-negara yang melirik kekuatan cyber sebagai salah satu faktor penting ketahanan nasional dalam konteks politik dan kekuasaan.

Bagaimanakah para peneliti global melihat tendensi ini sebagai kajian yang menarik dalam hal keterlibatan teknologi hacking computer dan konstalasi politik.

Setelah dikejutkan dengan aksi Stuxnet diawal 2010, tahun yang menandai awal baru Perang Dunia Maya itu dilengkapi oleh satu fenomena luar biasa yang menarik perhatian masyarakat global, dengan mencuatnya kontroversi organisasi whistleblower Wikileaks yang kembali memanfaatkan teknologi hacking computer untuk tujuan-tujuan politik.

Cyber Politics

Istilah cyber-politics dalam khasanah keilmuan Indonesia memang bukan satu subjek studi yang cukup akrab ditelinga masyarakat umum, karena itu dalam pembahasannya topik ini cukup asing terutama dikaitkan dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin bergerak maju melahirkan berbagai macam inovasi yang membentuk dunia modern.

Terdapat istilah-istilah dalam kaitan teknologi hacking komputer dengan dunia politik seperti Hacktivism, Political Cracking, Political Defacement, Electronic Civil Disobedience, Cyber-Warfare, sampai dengan Firesala, dan lain sebagainya.

Istilah cyber-politics secara singkat dapat direfleksikan melalui satu kalimat “internet based conflict involving politically motivated attacks on information & information system.”

Cyber Warfare (Perang Dunia Maya)

Sementara Cyber Warfare (Perang Cyber) dalam konteks politik global dapat dipahami sebagai aksi politik yang melibatkan kemampuan hacking komputer dalam mencapai tujuan-tujuan si pemilik kepentingan yang diantaranya bisa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas semacam sabotase dan spionase.

“Cyber Warfare is an action of a nation-state to penetrate another nation’s computers or networks for the purposes of causing damage or disruption.”

Kalau kita pernah mendengar istilah Aurora, Stuxnet, Ghosnet sampai Wikileaks Takedown dan semua konsepsi global terkait digunakannya teknologi hacking komputer untuk tujuan-tujuan politik dalam format Perang Dunia maya, disinilah pembahasan Cyber-Warfare sesungguhnya dapat difokuskan.

Stuxnet adalah worm komputer yang diciptakan tahun 2010 dan telah menginfeksi sekitar 60 persen sistem komputer di Iran, yang berhasil meremote ledakan berbahaya di pusat pengayaan uranium pengembang nuklir. Peristiwa tersebut disinyalir dilakukan Israel dan Amerika Serikat.

Dunia Masa Depan

Setelah negara-negara super power mulai melirik technology hacking komputer sebagai salah satu elemen dari ketahanan nasional mereka, disinyalir bahwa dimasa yang akan datang perang konvensional yang melibatkan fisik dan kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan strategi negara-negara besar dalam mencapai tujuan politiknya.

Karenanya pada masa kini teknologi hacking komputer yang selama ini dianggap sebelah mata, bahkan kurang dipahami oleh masyarakat biasa

Wawasan Cyber-Politics: Hactivism, Cybercrime/Cybermafia, Cyberterrorism dan Cyberwarfare

Dunia global dan kemajuan teknologi modern, perkembangan internet beserta aktivitas di dunia maya/cyber tidak terlepas dari meningkatnya aksi-aksi kejahatan dan kriminalitas untuk tujuan profit, sosial-politik atau sebaliknya hanya sekedar penyebaran ideologi individu semata. Namun yang sangat disayangkan hari ini, masyarakat umum ternyata masih agak awam dalam memahami perbedaan diantara aksi-aksi di dunia maya yang kerap melibatkan teknik hacking komputer dengan beragam motif tersebut.

Sederhananya, seorang kriminalitas cyber di dunia maya (cracker=perusak) berbeda dengan hacker, berbeda dengan hactivist, berbeda dengan cyberterrorist.

Hactivism & Cybercrime

Sebut saja *Political Activism* atau yang dikenal dengan istilah 'Hactivism' yang berbeda secara definisi dan implementasi dengan Cybercrime apalagi Cyberterrorism. Namun pembedaan ini menjadi kabur seiring dengan minimnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga konotasi negatif kerap melekat dan sebaliknya mereka para pemula yang minim wawasan (baca: internet users/pecinta teknologi) justru semakin terbodohi oleh statement-statement antipolitik di dunia maya.

Hactivism secara definisi dimaknai sebagai aksi yang tidak menggunakan kekerasan fisik juga tidak menimbulkan kekerasan fisik secara langsung dengan menggunakan teknik hacking komputer untuk tujuan-tujuan politis. Mengutip Samuel dalam pembatasan disertasi Harvard nya "*hactivism is the nonviolent use of illegal or legally ambiguous digital tools in pursuit of political ends.*" Bentuk aksi Hactivism misalnya seperti yang dilakukan kelompok Hactivism pertama *the Cult of the Dead Cow* di Amerika salahsatunya lewat aksi developing 'Goolag Tool' sebagai bentuk protes atas dominasi microsoft, atau kelompok *The Electrohippies* di Inggris dengan Gerakan propaganda Anti-Globalisasi nya di dunia maya.

Hactivism berbeda dengan Cyber-crime dan Cyberterrorism yang dari aksi non-fisiknya dapat menimbulkan kekerasan fisik di dunia nyata. Seorang hactivist tidak melakukan aksi (sekalipun ilegal) untuk tujuan profit atau menciderai internet users atau individu dan kelompok di dunia nyata. Diantara aksi-aksi Hactivism yang dikenal umum oleh masyarakat global adalah *DDoS Attack*, *Political Defacement/Cracking*, penyerangan email, *Hacking and Computer Breaks-in*, serta penyebaran virus komputer dan worm (I LOVE U Virus).

Cybercrime menurut European Commission secara definisi “*criminal offences committed by means of electronic communication networks and information system or againts such networks and systems*”, yang digolongkan sebagai aksi Cybermafia jika kelompok penjahat dunia maya tersebut terorganisir. Kegiatan kriminalitas siber kelas dunia salah satunya seperti yang terjadi ditahun 2001 ketika 150 *expert internet users* melakukan rapat di Eropa bagian Timur tepatnya Ukraina untuk membentuk suatu organisasi kriminal ‘CarderPlanet’ dibawah pimpinan Dmitry Glubov sebagai ‘the Godfather’ dengan pemahaman dasar bahwa internet mampu menciptakan kesempatan *money laundry* dan *profit making*. Kelompok yang tergolong mafiacyber ini mengorganisir pencurian data kartu kredit lalu menjualnya melalui aksinya yang dikenal dengan ‘*trafficking banking data*.’

Cyberterrorism

Cyberterrorism adalah bentuk extreme lain dalam terminologi dunia modern yang melibatkan aksi-aksi dengan teknologi untuk tujuan politis lewat aksi kriminalitas maya seperti penyerangan sistem komputer, networks, yang tujuannya membahayakan, merugikan bahkan dapat menciderai kehidupan manusia dan mengancam keamanan nasional suatu negara. Diantara aksi mereka seperti mencari kelemahan (*vulnerability*) dalam sistem kontrol transportasi (*traffic control system*) target.

Mengutip satu definisi umum, menurut agen FBI Mark Pollitt ‘*cyberterrorism is the premeditated, politically motivated attack againts information, computer systems, computer programs, and data which result in violence againts noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents*. Ditambahkan Danning, pakar cyber-politics, bahwa aksi-aksi terorisme melalui dunia cyber dapat menyebabkan kerugian-kerugian yang sangat serius, bisa berupa kesulitan ekonomi sampai dengan menghilangkan kekuasaan suatu Pemerintahan atau membuat *collaps* Perusahaan target di suatu negara.

Diawal-awal kemunculannya salah satu aksi cyberterrorism yang menyita banyak perhatian dunia global diantaranya yang terjadi di Jepang tahun 1995 dimana sebuah software yang disusupkan terroris berhasil mengacaukan jalur transportasi di Tokyo yang membunuh 12 orang dan melukai lebih dari 6000 orang.

Cyberwarfare

Aksi-aksi diatas tidak jauh berbeda dengan ‘Cyberwarfare’ dalam terminology Cyber-Politics yang belakangan ini semakin marak diperbincangkan dan dipromosikan media-media di penjuru dunia, terutama semenjak penyerangan stuxnet ke Instalasi Pengayaan Uranium Iran.

Istilah-istilah seperti Aurora, Stuxnet, Ghosnet sampai Wikileaks Takedown dan semua konsepsi global terkait digunakannya technology hacking komputer untuk tujuan-tujuan politik dalam format Perang Dunia Maya, disinilah pembahasan Cyber-Warfare sesungguhnya dapat difokuskan.

Cyberwarfare atau Perang Cyber adalah aksi-aksi dunia maya yang melibatkan penggunaan teknik hacking komputer didasari oleh kepentingan-kepentingan Pemerintah suatu negara untuk tujuan-tujuan politik (ekonomi-sosial, dll) melalui aksi-aksi spionase atau sabotase sampai otoritas 'system remote' terhadap komputer target, yang dapat merugikan dan menimbulkan kerusakan yang signifikan.

E-Government Indonesia untuk Demokrasi Bangsa

Kemajuan teknologi internet hari ini sesungguhnya bermanfaat untuk menghasilkan suatu konsensus sosial-politik yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan online dengan melibatkan rakyat dan pemerintah melalui diskusi ruang publik. Setidaknya hal tersebutlah yang mulai terjadi di negara-negara maju dan berkembang yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan eksistensi ruang maya. Konsensus kedua belah pihak tersebut nantinya akan menghasilkan satu kebijakan bersama ‘common decision’ yang berfungsi sebagai input dalam pembuatan kebijakan ‘making policy process’ oleh para decision makers dan stakeholders. Disinilah prinsip-prinsip demokrasi dan internet atau yang istilahnya dikenal sebagai ‘E-Democracy’ bertemu dalam konteks politik dan teknologi modern yang kemudian berujung kepada sebuah cita-cita ‘E-Government’ untuk masa depan bangsa.

Sistem E-Government hari ini kerap menjadi acuan dan jalan bagi negara-negara di dunia pendukung demokrasi untuk mewujudkan satu pemerintahan yang terbuka, efektif dan efisien. Namun sebelum penerapan E-Government, konsep E-Democracy atau yang juga dikenal sebagai Demokrasi Digital tersebut terlebih dahulu menjadi bahan olahan penting para akademisi, technocrats maupun pemerintah-pemerintah di dunia dalam membentuk masyarakat sejahtera yang melibatkan teknologi internet di dunia modern.

Pemerintah dan E-Democracy: Sebuah Kebutuhan Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini, budaya politik Indonesia yang muncul ke permukaan adalah ‘rakyat yang frustrasi’ yang menimbulkan krisis kepercayaan karena aspirasi mereka tidak didengar atau terakomodir, bahwa kendaraan-kendaraan politik (baca: parpol) hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan golongan. Dengan demikian internet sebagai salah satu wujud model ruang publik ‘public sphere’ yang idealnya dapat mempertemukan pemerintah dan rakyat diharapkan mampu menjawab persoalan ‘krisis kepercayaan’ tersebut. Salahsatunya dengan lebih meningkatkan perannya dalam memediasi rakyat dan pemerintah, selain mengakomodasi kebutuhan negara melalui fasilitas dan kemudahan dari kemajuan teknologi cyber.

Oleh karena semakin meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap peran-peran intitusi-institusi politik tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Partai Politik) dalam menyalurkan aspirasi misalnya, dapat dieliminir, salahsatunya dengan cara lebih aktif memanfaatkan internet untuk menjadi ‘alat pertimbangan politik’ demi mewujudkan demokrasi. Dengan demikian demokrasi digital dapat direalisasikan melalui praktek ‘civil online participation’ salahsatunya adalah lewat penerapan E-Government system, yaitu dengan memanfaatkan internet dan teknologi komputer untuk operational pemerintahan,

seperti pelayanan umum yang terkomputerisasi dan difasilitasi lewat dunia maya, dengan harapan bahwa ‘demokrasi lewat dunia maya dapat menjawab kebutuhan bangsa.’

‘E-Government’ Sistem Untuk Indonesia

Bagaimana internet memfasilitasi tumbuhkembangnya diskursus demokrasi menjadi fokus banyak akademisi dan para pembuat kebijakan di dunia dengan dasar pertimbangan bahwa teknologi internet hari ini telah memainkan fungsi-fungsi ganda ‘multiple functions’. Diantaranya, menyoroti proses terbentuknya hubungan kontrol antara pemerintah dan rakyat melalui fungsi ruang publik. Dengan menganalisa peran internet dalam hal hubungan pemerintah dan rakyat di era teknologi modern yang bersumber kepada prinsip demokrasi kita sampai kepada perwujudan sistem E-Government yang dianggap sebagai teknologi untuk politik bangsa.

E-Government system dalam prakteknya di negara-negara maju dan berkembang dapat meminimalisir bahkan menekan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, mensesederhanakan birokrasi lewat sistem satu pintu, meningkatkan akuntabilitas pemerintah suatu negara karena keterbukaan via internet sehingga dapat memupuk kembali kepercayaan rakyat, memberi kemudahan akses untuk rakyat dalam pelayanan negara dan dalam memperoleh informasi, memudahkan proses pembuatan kebijakan ‘policy making process’ yang melibatkan interaksi dan komunikasi antara rakyat dengan policy makers dan stakeholders (praktek demokrasi deliberatif), dan tentunya seperti yang sudah diperlihatkan Cina dan India lewat praktek sistem E-Government mereka, dapat menekan tingkat korupsi di suatu negara yang bagi Indonesia adalah suatu masalah sangat krusial dan perlu dicarikan solusinya.

Hal yang penting kemudian untuk menjadi perhatian bersama adalah bahwa penerapan sistem E-Government oleh suatu pemerintahan negara harus disinergiskan dengan keamanan teknologi dari ‘computer security’ demi menghadapi dinamisasi teknologi global yang mau tidak mau rentan terpolitisasi oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar.

E-Government Indonesia dan Agenda Perubahan

Untuk merealisasikan satu E-Government system, beberapa hal perlu dilakukan terlebih dahulu, demi memaksimalkan fungsi internet untuk kemajuan bangsa. Diantaranya adalah mengembalikan peran pemerintah melalui deregulasi perundang-undangan cyber ICT terkait kebebasan internet. Merekonsepsi Perundang-undangan terkait kejahatan Cyber/cybercrime dalam hal kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat civil dengan mempertimbangkan opini publik. Kemudian memaksimalkan internet sebagai ‘a tool of democracy’ dengan mengaktifkan perannya sebagai ‘alat pertimbangan’ dalam menghasilkan satu keputusan.

Selain itu Pemerintah juga perlu menetralsir diri dari pengevaluasian kinerja aparatur negara yang di lakukan masyarakat civil dengan mengaspirasikan ide-ide mereka melalui internet. Saatnya pemerintah mencuci bersih pemikiran-pemikiran 'lama' bahwa menerima sepenuhnya aspirasi rakyat sama dengan 'pemerintah lemah' dalam artian tidak memiliki konsep tentang apa yang cocok untuk masa depan bangsa. Dalam satu pandangan politik, pemerintah dianggap tidak bertaring jika setiap aspirasi didengar (Machiavelli dan konsep 'Strong Government' misalnya). Tidak melulu mencontek pemerintah-pemerintah asing yang bertahan dalam sebuah pandangan bahwa 'pemerintah harus kuat demi rakyat.' Indonesia sebagai bangsa besar harus mampu menunjukkan identitasnya sendiri sebagai bangsa dengan 'pemerintah yang kuat karena rakyat.

Kemudian memperat hubungan antara pemerintah dan akademisi-akademisi potensial dengan ide-ide perubahan mereka tentang negara masa depan. Memaksimalkan peran-peran praktisi IT tanah air dalam hal membentuk Indonesia sebagai bangsa teknologi, serta menjejaki hubungan antara Pemerintah dengan kaum muda yang potensial dalam hal memajukan dunia Teknologi dan Informasi Indonesia, memberdayakan mereka demi menciptakan generasi kokoh Tanah Air, para calon pemimpin bangsa dengan limpahan inovasi teknologi.

Nofia FITRI aka Bunga Mataharry, aka whitecoin, aka Casper_SPY, adalah lulusan Ilmu Politik Universitas Nasional, Pendiri Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Nasional (KSM UNAS) Jakarta, saat ini tengah menempuh pendidikan Master Hubungan International (EMU/Turki), Aktivis Mahasiswa & Dunia Maya, dan Peneliti Muda untuk Indonesian Democracy (PSIK-Indonesia) yang aktif menulis seputar Filsafat, Ekonomi-Politik & Teknologi Hacking Komputer.

“Saatnya Hacker Muda Merubah DUNIA, Karena di Dada Kita ada Garuda, Save the World, Hack the Planet, Free the Universe!!!”

BEKASI, JANUARI 2012

Nofia Fitri

(The Ambassador of Devilzc0de INDONESIA, Binushacker Team Official Author, dan YF (X-Code) Staff Moderator)

Email:nofia.fitri@binushacker.org
Blog :nofiasbigprojects.blogspot